

Lampiran 1. Bukti Pembayaran UKT



Pembayaran Berhasil

Rp.5.000.000

Sumber Dana	Tabungan/Giro 1254557044
Jenis Layanan	PEMBAYARAN
Perguruan Tinggi	UPN Veteran Jawa Timur
Referensi Transaksi	240820000015789580
Tanggal Transaksi	20-08-2024
Waktu Transaksi	16:01:42 WIB
Nomor Billing	20071010274
Nama	ALYA SHAKYA KARIN
Program Studi	ILMU HUKUM
Strata	SI
Fakultas	FAK. ILMU HUKUM
Jurusan	ILMU HUKUM
Periode	TA2024-2025
Kode Pin	
<hr/>	
Rincian	
UKT	Rp. 5.000.000
Biaya Layanan	Rp. 0

Lampiran 2. Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT)

TEST OF ENGLISH PROFICIENCY CERTIFICATE SN : N. 02342 - 0

Name of Institution : PUSAT BAHASA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Name : AJZA SHAKIN KADEN Student Number : 36740520492011
DOB : 13/04/2002 Test Date : 23/09/2024
CN : 02342/TDP/1/0413/2024

Scaled Scores :

Listening Comprehension	: 66
Structure & Written Expression	: 52
Reading Comprehension	: 60
TOTAL SCORE	: 488

06 SEP 2024
True Copy of the Original


[Signature]
Mawahyuni, S.T., M.Pd.
02071993032001
Surabaya, 4 September 2024
Head

[Signature]
Mauli Kholidun, S.Pd., M.Pd.
NIP. 197640922006041001

Surabaya, 9 September 2024
Telah diteliti
UPJ Bahas
By Alimulhasan
[Signature]
Christina, Pd.

Scores are valid ONLY if the official score report is presented by the examinee.
Photocopies are to be verified by EPT PUSAT BAHASA UNESA.

Lampiran 3. Surat Tugas Dosen Pembimbing

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
Raya Rungkul Madya, Gunung Anyar – Surabaya Jawa Timur 60294
Telp./Fax (031) 8794313 http:// www.fhupnjatim.ac.id

SURAT PENUGASAN PEMBIMBING PROPOSAL/SKRIPSI
Nomor : SP/240/UN63.6/X/2023

1. Dalam rangka Program Proposal/Skripsi Mahasiswa :


Nama Mahasiswa : ALYA SHAKYA KARIN
NPM : 200710102274
Program Studi : HUKUM

2. Menetapkan Dosen Pembimbing Proposal/Skripsi :

Nama Pembimbing : MIKO ADITIYA SUHARTO, S.H.,M.H.
NIP/NPT : 20 1 19910721 222

3. Untuk masa 2 (dua) semester tmt. 05 Agustus 2023

4. Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Surabaya, 10 Oktober 2023
DEKAN

Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

Lampiran 4. Bukti Penyerahan Berkas Laporan Magang



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
Raya Rungkut Madya Gunung Anyar – Surabaya 60294
Telp./ Fax. (031) 8794313 Laman : www.fhupnjatim.ac.id

BUKTI PENYERAHAN LAPORAN MAGANG MBKM - PKL PROFESI

1. Nama Mahasiswa : Aditya Shadya Karin
2. NPM./Program Studi : 20071010274 /HUKUM
3. Konsentrasi : PIDANA/PERDATA/HAN-HTN/401 PILIH SALAH SATU
4. Judul : Mekanisme Pengangkutan Anak dengan kewarganegaraan Indonesia oleh Warga Negara Asing (inter-country Adoption) di Pengadilan Negeri Surabaya

Telah menyerahkan Laporan Magang MBKM – PKL Profesi kepada:

No.	Nama Penerima	Jumlah	Hari/Tgl	Tanda-tangan
1.	Pembimbing* : (<u>Geni Nurca R</u>)	1	Kamis 24/8/23	
2.	Ruang Baca* : (<u>SOEBIJONO</u>)	1	Kamis 24/8/23	
3.	Prodi Hukum* : (<u>Aditya P.</u>)	1	Kamis 24/8/23	

DENGAN 1 (SATU) CD

Menyetujui,
**KOORDINATOR PRODI
HUKUM**

ADHITYA WIDYA K. S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Lampiran 5. Transkrip Nilai Sementara

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

TRANSKRIP SEMENTARA

NAMA : Alya Shakya Karin
NPM : 20071010274
TEMPAT/TGL LAHIR : Kota Jakarta Selatan, 13/04/2002
FAKULTAS : Hukum
PROGRAM STUDI : Hukum

No	Nama Kuliah	Sks	Nilai	No	Nama Kuliah	Sks	Nilai
1	AGAMA ISLAM	3	B+	32	HUKUM PELAYANAN PUBLIK	2	A
2	ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKE	2	A-	33	HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH	2	A
3	BAHASA INDONESIA	3	A	34	HUKUM PERDATA	3	B+
4	BAHASA INGGRIS DASAR	2	A	35	HUKUM PERDATA INTERNASIONAL	2	A-
5	BAHASA INGGRIS II	2	A-	36	HUKUM PERIKATAN	2	C
6	BELA NEGARA	3	A	37	HUKUM PIDANA	3	B
7	ETIKA PROFESI HUKUM	2	A	38	HUKUM PIDANA INTERNASIONAL	2	A
8	FILSAFAT HUKUM	2	B	39	HUKUM PIDANA KHUSUS	2	B
9	HUKUM ACARA MAHKAMAH KONS	2	A	40	HUKUM SUMBER DAYA LAUT DAN PER	2	A-
10	HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA	3	B	41	HUKUM TATA NEGARA	3	A
11	HUKUM ACARA PERDATA	3	B-	42	HUKUM TELEMATIKA	2	A-
12	HUKUM ACARA PIDANA	3	C	43	HUKUM WARIS	2	A
13	HUKUM ACARA TATA USAHA NEGARA	3	A	44	ILMU NEGARA	3	A-
14	HUKUM ADAT	2	B+	45	KAPITA SELEKTA HUKUM INTERNASIONAL	2	A
15	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA	3	A	46	KEPEMIMPINAN	2	A-
16	HUKUM AGRARIA	2	A	47	KEWARGANEGARAAN	3	B+
17	HUKUM DAGANG	3	A-	48	KEWIRAUSAHAAN	3	A
18	HUKUM DAGANG INTERNASIONAL	2	B+	49	KULIAH KERJA NYATA	2	A
19	HUKUM DAN HAK AZASI MANUSIA	2	A-	50	METODE PENELITIAN HUKUM	3	A
20	HUKUM DAN PERANCANGAN PERUNDAI	2	A	51	PENDIDIKAN PANCASILA	3	A-
21	HUKUM DAN POLITIK	2	A	52	PENDIDIKAN PELAT KEMAHIRAN HK	4	A
22	HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER	2	A	53	PENGANTAR HUKUM INDONESIA	3	A-
23	HUKUM EKONOMI SYARIAH	2	B+	54	PENGANTAR ILMU HUKUM	3	B
24	HUKUM INTERNASIONAL	3	A	55	PERBANDINGAN HK PERDATA	2	A
25	HUKUM ISLAM	2	B-	56	PKL PROFESI	2	A
26	HUKUM KETENAGAKERJAAN	2	B+	57	PRAKTIKUM PERANC KONTRAK	2	B+
27	HUKUM KETAHANAN NEGARA	3	A	58	SKRIPSI	6	K
28	HUKUM LAUT	2	B+	59	SOSIOLOGI HUKUM	2	A-
29	HUKUM LINGKUNGAN	2	A-				
30	HUKUM MILITER	2	B+				
31	HUKUM PAJAK	2	B				


JUMLAH SKS YANG DITEMPUH : 145

INDEKS PRESTASI KUMULATIF : 3,47

Surabaya, 02/09/2024

NIP.

Lampiran 6. Form Pengajuan Judul

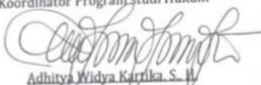

 SKEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
 UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
 Raya Rungkut Madya Gunung Anyar Surabaya Jawa Timur 60294 Fax./Telp. (031)
 8794313 Laman www.fhupnjatim.ac.id


FORM AJUAN JUDUL & PEMBIMBING (BARU/GANTI*) SKRIPSI/PKLP/MAGANG*
TA 2023/2024

Nama : Alya Shakya Karin Periksa Admin KPS.**
 NPM : 20071010274 (Pisgi Tamam) 23/12
 Konsentrasi : Perdata-/Pidana-/HTN-HAN-/HI
 Program Studi : Hukum Plot Pembimbing***: Miko Aditya Suharto., S.H. (M.Pd.)

Judul	Intervensi Vanuatu pada Permasalahan Organisasi Papua Merdeka di Indonesia Melalui Forum Asia Pasifik Tahun 2019
Latar Belakang	<p>Dalam berdirinya sebuah negara, terdapat empat syarat yang harus terpenuhi. Hal tersebut meliputi wilayah, penduduk, pemerintah, dan adanya pengakuan dari negara berdaulat lain. Keempat syarat ini juga merupakan bentuk batasan kuasa bagi pemerintah dari suatu wilayah untuk menerapkan hukum dan kebijakan yang berlaku.</p> <p>Indonesia merupakan salah satu contoh dari negara berdaulat di benua Asia yang diakui kemerdekaannya sejak 1945 dengan koordinat wilayah Indonesia saat ini terbentang dalam 6° LU - 11° LS dan 95° BT - 141° BT. Kewilayahan Indonesia yang cukup besar tak lepas dari masalah seperti keinginan daerah - daerah yang ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dahulu sempat terjadi pada Timor Timur (saat ini menjadi negara Timor Leste) dan beberapa tahun terakhir gencar terjadi pada wilayah Papua dengan munculnya gerakan pemberontakan Organisasi Papua Merdeka yang kemudian ditetapkan menjadi organisasi terorisme oleh pemerintah. Pemberontakan ini menjadi ancaman serius baik dari sisi internal negara maupun eksternal.</p> <p>Bentuk dampak bahaya internal yang dialami Indonesia dengan eksistensi Organisasi Papua Merdeka adalah disintegrasi bangsa, kerusakan - kerusakan infrastruktur, pelecehan seksual, dan kematian. Akibat - akibat yang dialami negara Indonesia tergolong dalam pelanggaran hak asasi manusia.</p> <p>Konflik gerakan separatis ini menggugah negara lain untuk melakukan intervensi akibat miskonsepsi terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Bukti intervensi ini ditemukan dalam forum internasional Asia Pasifik oleh negara Vanuatu yang mengangap aksi kejahatan tersebut dilakukan oleh Indonesia terhadap pihak - pihak yang ingin memisahkan diri dari Indonesia di Papua.</p>
Metode	Normatif
Lokasi	-
Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Hukum Internasional mengatur tindakan intervensi yang dilakukan Vanuatu dalam forum Asia Pasifik? 2. Apakah dukungan Vanuatu terhadap OPM dalam forum Asia Pasifik sesuai dengan perjanjian perjanjian internasional tentang HAM yang diratifikasi oleh Vanuatu?

Surabaya, November 2023

Menyetujui,
 Koordinator Program studi Hukum***

 Adhitya Widya Kartika, S. H.
 NIP. 199001 12 202012 2 003

Mahasiswa

 Alya Shakya Karin
 NPM. 20071010274

Form ditulis dengan komputer dengan tanda tangan asli, dalam 1(satu) halaman.
 *Pilih salah satu, coret tidak perlu | ***Diisi Admin Prodi. | **Diisi Koorprodi setelah mahasiswa submit dan menghadap Koorprodi untuk validasi. |

Lampiran 7. Kartu Rencana Studi (KRS)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL 'VETERAN'
J A W A T I M U R

KARTU RENCANA STUDI

NPM = 20071010274
Semester=Semester Genap TA.2023/2024
Nama = Alya Shakya Karin

No	Kode	Nama Kuliah	SKS
1	FH 191113	Skripsi	6
			6

Total SKS : 6

Surabaya,

Dosen Wali

(MUH. ARIEF SYAHRONI, S.H., M.H.)

Lampiran 8. Kartu Bimbingan Skripsi




KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI*)

*) Pelaksanaan bimbingan skripsi minimal 10x

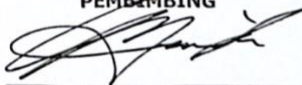
1. Nama Mahasiswa : Alya Shakya Karin
2. NPM./Program Studi : 20071010274 / ILMU HUKUM
3. Konsentrasi : PIDANA / PERDATA / HI / HAN — HTN *) PILIH SALAH SATU
4. Tanggal Pengajuan : 7 Desember 2023
5. Judul : Intervensi Vanuatu Pada Permasalahan
Organisasi Papua Merdeka di Indonesia dalam Perangkaan Pasifik
Tahun 2019
6. Pembimbing : Miko Aditya Suharto, S.H., M.H.

NO.	TANGGAL	MATERI/REVISI	PARAF	KET.
1	25/10/2023	Pengajuan topik dan judul		
2	6/12/2023	Revisi Judul, rumusan masalah		
3	8/12/2023	Pengempurnaan Judul dan rumusan masalah Acc didaftarkan Pada Admin Prodi		
4	4/03/2024	Pengajuan BAB II, BAB III Revisi BAB III		
5	14/06/2024	Acc Seminar Proposal		
6	15/07/2024	BAB 1-4		
7	4/09/2024	Acc Semhas		

NO.	TANGGAL	MATERI/REVISI	PARAF	KET.
		ACC revisi selesai silahkan diunggah pangaman / daftar Semhas		

Menyetujui,
KOORDINATOR PROGRAM STUDI

NIP./NPT.

Surabaya, 08 - 09 - 2024
PEMBIMBING

NIP./NPT. 199107212024061001

Lampiran 9. *Letter of Acceptance* (LoA) Jurnal



LEGAL SPIRIT
UNIVERSITAS WIDYA GAMA, MALANG
 Jl. Borobudur No. 35, Malang Telp. (0341) 411291
<http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/index>



SURAT PENERIMAAN NASKAH

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu/Sdr/i. Penulis Jurnal Legal Spirit
 di
 t e m p a t

Dengan hormat,

Bersama ini, pengelola Jurnal Hukum LEGAL SPIRIT menerangkan bahwa naskah/artikel yang berjudul:

Judul : Inkoherensi Dukungan Vanuatu Terhadap Kemerdekaan Papua Barat Dan
 Komitmen Terhadap Cedaw

Penulis : **Alya Shakya Karin, Miko Aditiya Suharto**

Artikel tersebut dinyatakan **DITERIMA** sesuai dan akan diproses ke tahap selanjutnya untuk dapat diterbitkan pada Jurnal Hukum LEGAL SPIRIT Volume 10 Tahun 2026 atau menyesuaikan dengan proses penerbitan jurnal. Selanjutnya artikel tersebut dapat diakses pada website OJS Jurnal LEGAL SPIRIT di laman <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/jhls/index>

Demikian surat ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas partisipasi dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Malang, 3 September 2024
 Editor-in-Chief

Dr. Fatkhurohman, S.H., M.Hum
 NDP. T993 218

Lampiran 10. Cek Plagiasi Turnitin Skripsi

SKRIPSI TERAKHIR.pdf			
ORIGINALITY REPORT			
18%	17%	6%	9%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	repository.upnjatim.ac.id Internet Source		4%
2	www.scribd.com Internet Source		1%
3	adoc.pub Internet Source		1%
4	Submitted to The University of the South Pacific Student Paper		<1%
5	docs.nhrc.or.th Internet Source		<1%
6	dspace.uui.ac.id Internet Source		<1%
7	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source		<1%
8	123dok.com Internet Source		<1%
9	pak.uui.ac.id Internet Source		<1%

Lampiran 11. Cek Plagiasi Turnitin Jurnal

JURNAL SKRIPSI-1.docx

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.upnjatim.ac.id

Internet Source

2%

2

estatemnts.unmeetings.org

Internet Source

1%

3

etd.umy.ac.id

Internet Source

1%

4

adoc.pub

Internet Source

1%

5

repository.uniba-bpn.ac.id

Internet Source

1%

6

journal.trunojoyo.ac.id

Internet Source

1%

7

ejournal.uin-suka.ac.id

Internet Source

1%

8

text-id.123dok.com

Internet Source

1%

9

repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

1%

Lampiran 12. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

BUKTI PENYERAHAN PROPOSAL SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Alya Shadya Karin
2. NPM./Program Studi : 202110174 /HUKUM
3. Konsentrasi : PIDANA / PERDATA / (H) / HAN-ITN¹ PILIH SALAH SATU
4. Judul : Intervensi Vanuatu Terhadap Permasalahan
Organisasi Papua Merdeka di Indonesia Pada Forum Asra-
Pasifik Tahun 2019

Telah menyerahkan Proposal Skripsi kepada :

No.	Nama Penerima	Jumlah	Hari/Tgl	Tanda-tangan
1.	Pembimbing* (Miko Aditya S.)	1	Kampus 15/08 '24	
2.	Ruang Baca** (SOEBIJONO)	1	Serwis 02/24 /09	
3.	Prodi** (Aditya P.)	1	Serwis 12/24 /08	

¹ Terpenting Permisalan

² Satu Sbl Cover

Surabaya,

Mengetahui

KOORDINATOR PRODI HUKUM

ADHITYA WIDYA K. S.H.,M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Lampiran 13. Bukti Daftar Ujian Lisan

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN LISAN	
Npm	20071010274
Nama	Alya Shakya Karin
NIK	3674065304020011
No.HP	081284441984
email	karin.shalya@gmail.com
TempatLahir	Kota Jakarta Selatan
TglLahir	4/13/2002
Alamat	Cluster Parangtritis C2 no 6 Vila Dago
JudulSkripsi	Intervensi Vanuatu Pada Permasalahan Organisasi Papua Merdeka Di Indonesia Dalam Forum Asia Pasifik Tahun 2019
Foto	
Upload File KTP	✓
Upload Ijazah SMA/SMU/MA/SMK	✓

Dengan ini menyatakan bahwa, semua data yang saya input adalah benar adanya, jika nanti pada saat cetak Ijazah, Transkrip dan SKPI ada kekeliruan saya tidak akan menuntut.

Surabaya, 9/15/2024 6:27:40 PM

Alya Shakya Karin

Lampiran 14. Lembar Revisi Penguji



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Raya Rungkut Madya Gunung Anyar, Surabaya 60294
Telp. (031) 8794313, 8706369 Fax (031) 8794313
Laman Http:// www.fhupn Jatim.ac.id

LEMBAR REVISI

1. Nama Mahasiswa : Alya Shadya Kusni
2. NPM./Program Studi : 20071010224 / HUKUM
3. Konsentrasi : PIDANA/PERDATA/HAN-HTN/PIH *PILIH SALAH SATU
4. Judul : Intervensi Vanuatu Pada Permasalahan Organisasi Papua Merdeka di Indonesia Dalam Forum Asia Pasifik Tahun 2019

NO	URAIAN	HALAMAN
1.	Perbaikan Asesori Proposal/Revisi	
2.	Rampangan for essay a) UCL No 39/1949 b) United Nations (1945) Charter of the United Nations and Statute of the International Justice c) Universal Declaration of Human Rights (1948) d) United Nations Human Rights Council (2000)	
3.	Penyusunan hasil Skripsi dan jurnal ilmiah ke dalam Flash disk	

Surabaya,

13/9/2024

Dosen Penguji

[Signature]
Kusni



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM
Raya Rungkut Madya Gunung Anyar, Surabaya 60294
Telp. (031) 8794313, 8706369 Fax. (031) 8794313
Laman Http:// www.fhupnjatim.ac.id

LEMBAR REVISI

- 1. Nama Mahasiswa : Alya Shaktya Kasili.
- 2. NPM./Program Studi : 20071010774 /HUKUM
- 3. Konsentrasi : PIDANA/PERDATA/HAN-HTN/HPH PILIH SALAH SATU
- 4. Judul : Intervensi Vanvatu Pada Permasalahan Organisasi Papua Merdeka di Indonesia Dalam Forum Asia Pasifik Tahun 2019

NO	URAIAN	HALAMAN
	Kesimpulan	
	lebih diperjelas	
	Rumusan masalah I dan II	
	tepatkan pada sistem hukum di Indonesia	

Alye 19/9/24
[Signature]

Surabaya, 13 September 2024
Dosen Penguji

[Signature]
Widyawati, S.H., F.H.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

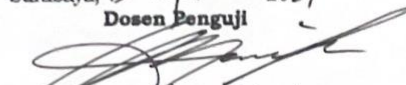
Raya Rungkut Madya Gunung Anyar, Surabaya 60294
Telp. (031) 8794313, 8706369 Fax. (031) 8794313
Laman Http:// www.fhupnjatim.ac.id

LEMBAR REVISI

1. Nama Mahasiswa : Alya Shalya Karin
2. NPM./Program Studi : 20 - 247 /HUKUM
3. Konsentrasi : PIDANA/PERDATA/HAN-HTN/HP PILIH SALAH SATU
4. Judul : Intervensi Vanuatu Pada Permasalahan OPM di Indonesia Dalam Forum Asia Pasifik Tahun 2019

NO	URAIAN	HALAMAN
	Revisi sesuai arahan penguji saat Semhas	
	ACC Revisi selesai 17/09	

Surabaya, 13 Sept 2024
Dosen Penguji


Miko Aditya Suharto



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.
3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.
4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.
5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

CHAPTER I PURPOSES AND PRINCIPLES

Article 1

The Purposes of the United Nations are:

1. To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace;
2. To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace;
3. To achieve international cooperation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; and
4. To be a center for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends.

Article 2

The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance with the following Principles.

1. The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members.
2. All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfil in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter.
3. All Members shall settle their international

disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.

4. All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations.

5. All Members shall give the United Nations every assistance in any action it takes in accordance with the present Charter, and shall refrain from giving assistance to any state against which the United Nations is taking preventive or enforcement action.

6. The Organization shall ensure that states which are not Members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security.

7. Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter VII.

CHAPTER II MEMBERSHIP

Article 3

The original Members of the United Nations shall be the states which, having participated in the United Nations Conference on International Organization at San Francisco, or having previously signed the Declaration by United Nations of January 1, 1942, sign the present Charter and ratify it in accordance with Article 110.

Now, therefore,

The General Assembly

proclaims

this Universal Declaration of Human Rights

as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction.

Article
01

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

down by the Security Council, but in no case shall such conditions place the parties in a position of inequality before the Court.

3. When a state which is not a Member of the United Nations is a party to a case, the Court shall fix the amount which that party is to contribute towards the expenses of the Court. This provision shall not apply if such state is bearing a share of the expenses of the Court.

Article 36

1. The jurisdiction of the Court comprises all cases which the parties refer to it and all matters specially provided for in the Charter of the United Nations or in treaties and conventions in force.

2. The states parties to the present Statute may at any time declare that they recognize as compulsory *ipso facto* and without special agreement, in relation to any other state accepting the same obligation, the jurisdiction of the Court in all legal disputes concerning:

- a. the interpretation of a treaty;
- b. any question of international law;
- c. the existence of any fact which, if established, would constitute a breach of an international obligation;
- d. the nature or extent of the reparation to be made for the breach of an international obligation.

3. The declarations referred to above may be made unconditionally or on condition of reciprocity on the part of several or certain states, or for a certain time.

4. Such declarations shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations, who shall transmit copies thereof to the parties to the Statute and to the Registrar of the Court.

5. Declarations made under Article 36 of the Statute of the Permanent Court of International Justice and which are still in force shall be deemed, as between the parties to the present Statute, to be acceptances of the compulsory jurisdiction of the

International Court of Justice for the period which they still have to run and in accordance with their terms.

6. In the event of a dispute as to whether the Court has jurisdiction, the matter shall be settled by the decision of the Court.

Article 37

Whenever a treaty or convention in force provides for reference of a matter to a tribunal to have been instituted by the League of Nations, or to the Permanent Court of International Justice, the matter shall, as between the parties to the present Statute, be referred to the International Court of Justice.

Article 38

1. The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:

- a. international conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;
- b. international custom, as evidence of a general practice accepted as law;
- c. the general principles of law recognized by civilized nations;
- d. subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.

2. This provision shall not prejudice the power of the Court to decide a case *ex aequo et bono*, if the parties agree thereto.

CHAPTER III

PROCEDURE

Article 39

1. The official languages of the Court shall be French and English. If the parties agree that the